

**PEMAHAMAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
TENTANG DEMOKRASI DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Studi di Kabupaten Malang**

**Oleh :
Budhy Prianto¹**

Abstrak : Pada hakekatnya pelaksanaan otonomi daerah adalah merupakan implementasi atas nilai-nilai demokrasi. Sementara demokrasi akan sulit terejawantah dengan baik tanpa dilandasi oleh pemahaman hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak politik warga negara. Oleh karenanya anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai kelompok elit di desa yang sekaligus memiliki fungsi legislatif selayaknya perlu diketahui tingkat pemahamannya atas demokrasi (HAM). Penelitian ini merupakan penelitian survei yang menggunakan anggota BPD sebagai responden penelitian. Dari populasi penelitian anggota BPD di 406 desa di Kabupaten Malang, diambil hanya 8 desa secara acak. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman atas demokrasi dan HAM anggota BPD, dan analisis statistik inferensial digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman itu. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tingkat pemahaman anggota BPD atas demokrasi dan HAM sangat tinggi. Sedangkan faktor-faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, proses rekrutmen menjadi anggota BPD, lamanya menjadi anggota BPD, dan pengalaman kerja di bidang pemerintahan sebelum menjadi anggota BPD, yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman anggota BPD atas demokrasi dan HAM, setelah diuji dengan statistik inferensial, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ternyata tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata kunci : anggota BPD, demokrasi, hak asasi manusia, pemahaman

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah - kedua undang-undang tersebut sering disebut sebagai undang-undang otonomi daerah - menyebabkan berubahnya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang tadinya sentralistis-otoriter (lihat Mas'ood, 1994:127-130), berubah menjadi desentralistis-demokratis. Struktur dan pola hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik di daerah dan di desa serta merta turut pula berubah.

Pada arah pemerintah desa struktur pemerintah yang sentralistis dicoba untuk dihapuskan, dan menggantinya dengan struktur pemerintah yang bercorakkan

¹ Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Uinver Malang

demokratis dan lokal (Soenyono, 1999:13-15). Ini ditandai dengan diakomodasikannya lembaga dan mekanisme adat setempat pada pemerintahan desa di satu sisi, dan pada sisi yang lain dibentuknya lembaga legislatif tingkat desa yang disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) (lihat pasal 94, 95, 102 dan 104 UU No. 22 Tahun 1999). Lembaga ini memiliki fungsi legislasi, sehingga diharapkan ia mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan yang demokratis, dan mampu melaksanakan kontrol yang signifikan pada aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi yang lain, anggota BPD berasal dari para tokoh masyarakat dan pemimpin politik lokal, yang tentunya dapat berperan atau diperankan sebagai *agent of political education* menuju masyarakat yang demokratis sekaligus memahami HAM. Peran yang strategis demikian tidak akan bisa terwujud tanpa diimbangi pemahaman demokrasi dan hak azasi manusia yang memadai di kalangan para anggota BPD.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan alasan-alasan itulah, maka dalam penelitian ini dikemukakan dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana tingkat pemahaman anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) terhadap demokrasi dan hak-hak azasi manusia bagi penyiapan sumberdaya manusia pedesaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Kedua*, faktor-faktor apa yang melatar belakangi terbentuknya pemahaman tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan deskripsi tentang pemahaman politik masyarakat desa secara empirik, khususnya yang terkait dengan pemahaman terhadap demokrasi dan hak-hak azasi manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi dan Demokratisasi Desa

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, kuta, bori, marga, dan lain-lainnya. Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa, serta harus terdapat pula Badan Perwakilan Desa (BPD). Yang dimaksud desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dengan ketentuan seperti ini, maka desa yang dibentuk di kabupaten memiliki otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kemandirian pemerintah desa dapat dilihat dari pemilihan kepala desa, yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan ditetapkan serta bertanggungjawab kepada BPD. Sedangkan Bupati hanya bertindak mengesahkan saja. Kemandirian itu dapat juga dilihat, bahwa penghapusan, pembentukan atau penggabungan desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan penduduk daerah kabupaten dan DPRD Kabupaten. Disamping itu hubungan antara kepala desa dengan badan legislatif (perwakilan masyarakat) tidak lagi dilakukan

oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979, akan tetapi dilakukan sepenuhnya oleh BPD yang dipilih oleh penduduk desa. Kepala Desa tidak lagi mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya kepada Camat dan Bupati sebagaimana ketentuan terdahulu, akan tetapi tanggung jawab Kepala Desa adalah kepada BPD.

2. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Civil Society

Kajian demokrasi dalam ilmu politik biasanya dipilah ke dalam dua macam pemahaman, yaitu pemahaman demokrasi secara normatif dan pemahaman demokrasi secara empirik atau disebut juga dengan demokrasi prosedural (*procedural democracy*) (Gaffar, 1999:3). Buultjens (1978:45) menyebutkan pemahaman yang disebut kedua itu sebagai *mechanism of democracy*. Pemahaman demokrasi secara normatif menurut Gaffar, bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya dikenal ungkapan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Sedangkan pemahaman demokrasi secara empirik atau mekanik, lebih cenderung pada rumusan-rumusan demokrasi yang secara empirik dipraktikkan oleh banyak negara dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Juan Linz sebagaimana dikutip Gaffar (1999:4) misalnya, mendefinisikan demokrasi sebagai berikut :

"We shall call a political system democratic when it allows the free formulation of political preferences, through the use of basic freedoms of association, information, and communication, for the purpose of free competition between leaders to validate at regular intervals by non-violent means their claim to rule; a democratic system does this without excluding any effective political office from that competition or prohibiting any members of the political community from expressing their preference by norms requiring the use of force to enforce them".

Sementara Buultjens (1978:47-73) mengemukakan terdapat empat konsep agar demokrasi dapat dirumuskan ke dalam fakta empirik, yaitu

"the practice of representation; the availability of choice and alternatives; preservation of the rights of the individual; and the establishment of public and private security. Taken collectively, they provide the touchstone by which it is possible to test the workings of modern democracy and evaluate the level of its operations".

Mencermati definisi-definisi di atas jelas sekali terlihat, bahwa demokrasi di dalamnya terdapat penghormatan (*dignity*) hak-hak individu atau hak-hak personal (*personal rights*). Mayo (1960:260) menyebut hak personal atau *human dignity* ini sebagai "*essential*" *purpose of democracy*. *Personal rights* atau *human dignity* ini pada perkembangannya kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia (lihat misalnya Suseno, 1994:3-5).

Dengan mengutip *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Covenant on Economic, Social and Culture Rights*, Budiardjo (1983:126-127) menyebutkan hak-hak sipil dan politik itu meliputi : hak atas hidup; hak atas kebebasan dan keamanan dirinya; hak atas kesamaan di muka peradilan; hak atas kebebasan berpikir, mempunyai *conscience*, beragama; hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan; hak atas kebebasan berkumpul secara damai; dan hak berserikat. Sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup antara lain : hak atas pekerjaan; hak untuk membentuk serikat sekerja; hak atas pensiun; hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak; dan hak atas pendidikan. Terpenuhinya atau ditegakkannya hak-hak tersebut akan mendorong terbentuknya individu-individu dan masyarakat yang otonom. Sebuah masyarakat yang otonom akan menjadi lahan subur bagi terbentuknya *civil society* (Gaffar, 1999:181).

Definisi *civil society* menurut Hikam (1996:3) mengutip Tocqueville, adalah sebagai "wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain : kesukarelaan (*voluntary*); keswasembadaan (*self-generating*); dan keswadayaan (*self-supporting*); keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya". Oleh karenanya lebih lanjut Hikam (1996:76-95) menguraikan, bahwa demokrasi, khususnya di Indonesia mesti dibangun melalui jalan *civil society* ini.

3. Pendidikan Politik : Upaya Pemberdayaan Politik Masyarakat

Pendidikan Politik menurut Surbakti (1992:117) merupakan proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat dikenalkan dan diajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, keluarga, lembaga agama, media massa dan sebagainya.

Di negara yang bersistem politik totaliter, pendidikan politik bertujuan untuk memobilisir massa rakyat. Oleh karenanya pendidikan politik dalam sistem seperti ini bersifat indoktrinatif, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin (Surbakti, 1992:118). Selama orde baru Indonesia, pendidikan politik yang terselenggara lebih cenderung bersifat indoktrinatif ini. Akibatnya proses pendidikan politik tidak mampu atau bahkan disengaja untuk tidak menumbuhkembangkan *civil society* (Gaffar, 1999:118-121). Sebaliknya, pada sistem politik yang demokratis atau setidaknya yang menuju demokrasi, pendidikan politik ditujukan untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat. Hal ini bisa dilihat, bahwa pendidikan politik diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik (Kantapawira, 1980:54).

Maka dalam kerangka otonomi daerah/desa upaya pemberdayaan masyarakat tentunya harus diorientasikan kepada bagaimana masyarakat memiliki pemahaman akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai manusia melalui pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia, atau paradigma *civil society*. Dengan

paradigma *civil society* menurut Hikam (1996:225) diusahakan mengembalikan harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan demokrasi sebagai sistem politik yang mampu menjamin partisipasi mereka secara terbuka. Dalam *civil society* setiap kecenderungan partikularisme dihindari, namun ia juga menolak totalisme dan uniformisme. Ia menghargai kebebasan individu, namun menolak anarki; ia membela kebebasan berekspresi, tetapi pada saat yang sama menuntut tanggungjawab etik; ia menolak intervensi negara, tetapi tetap memerlukan negara sebagai pelindung dan penengah konflik baik internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Malang ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *survey* yang difokuskan pada upaya mengetahui, bagaimana tingkat pemahaman anggota BPD terhadap demokrasi dan HAM, yang nantinya dimungkinkan untuk dapat disusun program pendidikan politik rakyat. Untuk mengetahui tingkat pemahaman tersebut dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman anggota BPD terhadap : *prinsip-prinsip dan cara kerja demokrasi; hal-hal yang menyangkut pemerintah; hak dan kewajiban sebagai warga negara; the rule of law; partisipasi aktif; nilai-nilai demokrasi; keadilan sosial dan toleransi.*

Populasi mencakup seluruh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari 406 desa yang terdapat di Kabupaten Malang. Besarnya sampel ditentukan secara *quota* sebanyak 8 BPD, yang diambil masing-masing 2 BPD dari desa-desa di wilayah Malang Utara, Barat, Selatan dan Timur. Pengambilan sampel BPD dilakukan secara acak (*random sampling*). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert, dimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner kemudian dikelompokkan dalam 5 kategori tingkat pemahaman, yaitu kategori sangat rendah untuk jawaban yang memiliki rata-rata skor 1,00 – 1,79; kategori rendah untuk jawaban yang memiliki rata-rata skor 1,80 – 2,59; kategori sedang untuk jawaban yang memiliki rata-rata skor 2,60 – 3,39; kategori tinggi untuk jawaban yang memiliki rata-rata skor 3,40 – 4,19, dan kategori sangat tinggi untuk jawaban yang memiliki rata-rata skor 4,20 – 5,00. Untuk menganalisa tingkat pemahaman anggota BPD terhadap demokrasi dan HAM digunakan statistik deskriptif yang kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Sedang untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut digunakan statistik inferensial yang sesuai, dengan menggunakan bantuan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS atas data-data penelitian dari enam variabel yang diteliti, yakni; *Tingkat usia* (X_1), *Jenis kelamin* (X_2), *Tingkat pendidikan* (X_3), *Proses rekrutmen menjadi anggota BPD* (X_4), *Lamanya menjadi anggota BPD* (X_5), *Pengalaman kerja di bidang pemerintahan sebelum menjadi anggota BPD* (X_6) dan *Pemahaman Anggota BPD tentang Demokrasi dan HAM* (Y), maka diperoleh temuan penelitian sebagai berikut :

1. Karakteristik responden yang mewakili anggota BPD di Kabupaten Malang digambarkan sebagai berikut :
 - a. Anggota BPD di Kabupaten Malang sebagian besar (73,98%) berusia antara 26 – 45 tahun.
 - b. Keanggotaan BPD di Kabupaten Malang didominasi oleh laki-laki (91,8%).
 - c. Anggota BPD di Kabupaten Malang sebagian besar telah mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA (37,0%).
 - d. Anggota BPD di Kabupaten Malang sebagian besar bekerja pada perusahaan swasta (30,1%).
 - e. Anggota BPD di Kabupaten Malang sebagian besar adalah aktifis pada organisasi sosial keagamaan (39,6 %)

2. Pemahaman Anggota BPD tentang demokrasi dan HAM

Analisis deskriptif terhadap jawaban responden atas pemahaman anggota BPD tentang demokrasi dan HAM sampai pada kesimpulan, bahwa secara keseluruhan kategori tingkat pemahaman anggota BPD tentang demokrasi dan HAM adalah *sangat tinggi*, yang ditunjukkan oleh rata-rata skor untuk seluruh item (indikator) pemahaman demokrasi dan HAM sebesar 4,37. Sedangkan deskripsi kategori tingkat pemahaman anggota BPD untuk masing-masing indikator demokrasi dan HAM sebagaimana dimaksud dalam instrumen penelitian rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri, mayoritas responden (43,8 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 305 dan rata-rata skor sebesar 4,17 menunjukkan tingkat pemahaman *tinggi*.
- b. Hak untuk menyatakan pendapat, sebagian besar responden (49,3 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skor sebesar 324 dan rata-rata skor sebesar 4,44, yang menunjukkan tingkat pemahaman *sangat tinggi*.
- c. Hak untuk bebas menganut agama dan kepercayaan, sebagian besar responden (65,8 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skor sebesar 338 dan rata-rata skor sebesar 4,63, yang menunjukkan kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
- d. Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat/organisasi, mayoritas responden (52,1 %) menyatakan *setuju*. Adapun nilai total skornya sebesar 322 dan rata-rata skor sebesar 4,41, yang menandakan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
- e. Hak untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah, mayoritas responden (57,7 %) menyatakan *setuju*. Nilai total skornya sebesar 280 dan rata-rata skor sebesar 3,94 yang menandakan, bahwa kategori tingkat pemahaman responden adalah *tinggi*.
- f. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, sebagian besar responden (47,9 %) responden menyatakan *setuju*. Nilai total skor sebesar 313 dan rata-rata skor sebesar 4,29, yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden adalah *sangat tinggi*.
- g. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kenegaraan/pemerintahan, mayoritas responden (53,4 %) menyatakan *setuju*. Nilai

- total skor sebesar 313 dan rata-rata skor sebesar 4,29 yang menunjukkan, bahwa kategori tingkat pemahaman responden adalah *sangat tinggi*.
- h. Hak untuk memilih dan dipilih, sebagian besar responden (48,6 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skor sebesar 327 dan rata-rata skor sebesar 4,48 yang menunjukkan, bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - i. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sama dari pemerintah, mayoritas responden (56,2 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 331 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,53 yang itu artinya, bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - j. Hak untuk memperoleh kebebasan pribadi dan jaminan keamanan, mayoritas responden (53,4 %) menyatakan *setuju*. Nilai total skornya sebesar 312 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,27 yang menunjukkan, bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - k. Tujuan pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara, mayoritas responden (42,5 %) menyatakan *setuju*. Nilai total skornya sebesar 287 dan nilai rata-rata skor sebesar 3,99 yang berarti bahwa kategori tingkat pemahaman responden *tinggi*.
 - l. Perlindungan konstitusional oleh negara, selain jaminan terhadap hak-hak individu, tetapi harus ditentukan pula prosedur untuk memperoleh hak-hak tersebut, mayoritas responden (63,0) menyatakan *setuju*. Nilai total skornya sebesar 293 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,01 yang menunjukkan, bahwa kategori tingkat pemahaman responden adalah *tinggi*.
 - m. Jaminan adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, mayoritas responden (58,9 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 328 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,49 yang menunjukkan, bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - n. Jaminan terselenggarakannya supremasi hukum, tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (orang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum), mayoritas responden (58,9 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 327 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,47 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - o. Jaminan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sebagian besar responden (64,4 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 335 dan nilai rata-rata skornya sebesar 4,59 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden adalah *sangat tinggi*.
 - p. Kepastian jaminan hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan, mayoritas responden (64,4 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 317 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,34 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - q. Penyelesaian perselisihan antar individu ataupun kelompok harus dilakukan secara damai dan melembaga, sebagian besar responden (57,5 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 333 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,56 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.

- r. Larangan adanya propaganda perang (kekerasan) dan diskriminasi, sebagian besar responden (49,3 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 320 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,38 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - s. Jaminan terselenggarakannya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, sebagian besar responden (49,3 %) menyatakan *setuju*. Adapun nilai total skor sebesar 321 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,39 yang berarti bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - t. Penyelenggaraan pergantian kepemimpinan secara tertib dan teratur, sebagian besar responden (48,3 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 324 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,44 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - u. Jaminan bahwa negara harus mampu membatasi penggunaan kekerasan sampai titik minimum, sebagian besar responden (53,4 %) menyatakan *setuju*. Nilai total skornya sebesar 319 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,37 yang berarti bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - v. Pengakuan dari negara dan masyarakat atas keanekaragaman (pluralitas) dalam masyarakat, sebagian besar responden (58,9 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 331 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,53 yang menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - w. Jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak kaum minoritas, sebagian besar responden ((43,8 %) menyatakan *setuju*. Nilai total skornya sebesar 307 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,20 yang berarti bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
 - x. Jaminan terjaganya solidaritas (kesetiakawanan) dan tegaknya keadilan, sebagian besar responden (64,4 %) menyatakan *sangat setuju*. Nilai total skornya sebesar 335 dan nilai rata-rata skor sebesar 4,59 yang berarti menunjukkan bahwa kategori tingkat pemahaman responden *sangat tinggi*.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi pemahaman anggota BPD tentang demokrasi dan HAM adalah sebagai berikut :
- a. Hubungan semua variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , dan X_6) secara bersama-sama dengan variabel terikat (Y) ternyata sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) hanya sebesar 3,3 % secara berbanding terbalik.
 - b. Pengaruh Variabel X_1 (Tingkat Usia) terhadap variable Y sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi X_1 terhadap Y adalah sebesar 0,111 satuan Y
 - c. Pengaruh Variabel X_2 (Jenis Kelamin) terhadap variable Y sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi X_2 terhadap Y adalah sebesar 2,442 satuan Y
 - d. Pengaruh variable X_3 (Tingkat Pendidikan) terhadap variable Y sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi X_3 terhadap Y adalah sebesar 2,156 satuan Y
 - e. Pengaruh variable X_4 (Proses Menjadi Anggota BPD) terhadap variable Y sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi X_4 terhadap Y adalah sebesar -0,188 satuan Y secara berbanding terbalik.

- f. Pengaruh variable X_5 (Lamanya Menjadi Anggota BPD) terhadap variable Y sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi X_5 terhadap Y adalah sebesar 0,005 satuan Y
- g. Pengaruh variable X_6 (Pengalaman di Bidang Pemerintahan Sebelum Menjadi Anggota BPD) terhadap variable Y sangat lemah dan tidak signifikan. Kontribusi X_6 terhadap Y adalah sebesar 0,808 satuan Y

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi atas setiap item (indikator) yang terkait dengan demokrasi dan HAM, dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota BPD di Kabupaten Malang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil rata-rata skoring yang menunjukkan angka 4,37. Sedangkan enam variabel bebas (variabel X), yaitu : *tingkat usia responden (X 1); jenis kelamin (X 2); tingkat pendidikan (X 3); proses rekrutmen menjadi anggota BPD (X 4); lamanya menjadi anggota BPD (X 5); dan pengalaman kerja di bidang pemerintahan sebelum menjadi anggota BPD (X 6)*, yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap variabel tergantung (Y), yaitu *tingkat pemahaman anggota BPD atas demokrasi dan HAM*, setelah dilakukan uji statistik inferensial ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Budiman, Arief, 2000, Krisis 1998 : Perubahan dan Kontinuitas di Indonesia, dalam Budiman, Arief, dkk., *Harapan dan Kecemasan, Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Bigraf Publishing
- Buultjens, Ralph, 1978, *The Decline of Democracy, Essays on an Endangered Political Species*, Maryknoll, Orbis Book
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- Hikam, Muhammad, AS, 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, Penerbit LP3ES
- Imawan, Riswandha, 1992, *Peranan Organisasi Massa dan Organisasi Politik*, dalam Prisma, No. 4 Tahun XXI, April
- Kantapawira, Rusadi, 1980, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung, Penerbit Sinar Baru
- Mas'oed, Mohtar, 1994, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- Mayo, HB, 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, New York, Oxford University Press
- Soenjono, 1999, *Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, makalah Kuliah Tamu di FISIP Unmer Malang, 12 Oktober
- Suseno, Frans Magnis, 1994, *Hak Asasi Manusia Kontekstual atau Universal ?*, dalam Prisma, No. 11, November

Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia
Widia Sarana Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya